

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari ORLA, ORBA Sampai Reformasi) Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Anonim Al Anhar, *Hasil Amandemen UUD 1945 Tahun 1999-2000* (Solo : Al Anhar, 2009)
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah* (Jakarta : Citra Aditya Bakti)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- Buku Diklat UU No. 32 Th 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 2005)
- Buku Diklat UU No. 33 Th 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 2005)
- Cason, HN, *Berjiwa Pemimpin untuk Mencapai Kedudukan Lebih Tinggi*, (Bandung: Indah Jaya, 1980)
- Fauzan, Muhamad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : UI Press, 2006)
- Hendro, Suhendi, *Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Menyongsong Era Keterbukaan Tahun 2020*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002)
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Junadi, Purnawan, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Graint, 2004)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1984)
- Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1989)
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Graint, 2004)

Soegeng Sardi, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta ; UI Press, 1986)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Inonesia, 1981)

Soetandyo Wienjosebroto, Pengolahan dan Analisa Data, dalam Koentjaraningrat ed., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1983)

Sukarna, *Sosial / Kontrol Masyarakat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990)

Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

The Liang Gie, *Pemerintahan Daerah Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1993)

Umar, Husein, *Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Gramedia, 2001)

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah* (Bina Aksara, 1987)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 *tentang peraturan organisasi Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 *tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 *tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 *tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 *tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 *tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 *tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*
- Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2010

Internet / Artikel / Makalah / Majalah / Koran

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org>

Wikipedia Undang-Undang RI, Ensiklopedia Bebas, <http://id.wikipedia.org>

Wikipedia Depdagri RI, Ensiklopedia Bebas, <http://id.www.depdagri.co.id>

Humas Sospol Kesbanglinmas, Artikel. Selayang Pandang Sejarah Perkembangan Hansip / Linmas Dari Tahun Ke Tahun, WWW.Google.Co.Id diakses internet, Friday 13 Jan 2012 14:24 pm
Administrator